



Pendampingan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Bagi Petugas Keamanan Di Rorinata Residence Suka Maju Kecamatan Sunggal Deliserdang

Khamo Waruwu¹⁾, Khairun Na'im²⁾, Leonardo Indra Vitaharsa³⁾, Abdi Sugiarto⁴⁾, Muhammad Donni Lesmana Siahhaan⁵⁾, Ahmad Yudhira⁶⁾, Andi Nova Bukit⁷⁾, Elyani⁸⁾, Rosniwaty Br. Bangun⁹⁾

^{1,3,6,9}Manajemen ,Ekonomi, Universitas Tjut Nyak Dhien

^{2,4,7,8} Hukum , Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien

³Manajemen ,Manajemen, STIE Pariwisata Internasional

⁵Teknik Komputer ,Teknik, Universitas Pembangunan Panca Budi

Keywords :

Kata Kunci; SOP

Kata Kunci; Keamanan

Kata Kunci. Masyarakat

Correspondensi Author

Email: waruwukhamo.se.mm@gmail.com

History Artikel

Received: 30-03-2022;

Reviewed: 05-04-2022

Revised: 15-04-2022

Accepted: 20-04-2022

Published: 27-04-2022

DOI: 10.52622/mejuajujabdimas.v1i3.27

Abstrak. Rasa aman nyaman dalam bertempat tinggal pada satu lingkungan merupakan keinginan setiap orang agar terhindar dari rasa kekhawatiran dan tenang bersama keluarga dalam beraktifitas. Tujuan dari pengabdian untuk memberikan pengetahuan dalam hal standar operasional prosedur petugas keamanan. Kegiatan dilaksanakan di RT VI Rorinata Desa Suka Maju Sunggal yang diikuti dosen dari beberapa perguruan tinggi, melibatkan mahasiswa dan pengurus RT. Hasil dari pengabdian adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman batasan-batasan tugas dan tanggungjawab petugas dan kewajiban pengelola untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan pencurian dilingkungan kompleks dalam memberikan rasa aman nyaman bagi warga.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pendahuluan

Keamanan dan kenyamanan dalam hal apa saja mulai dari penggunaan bahan sandang sampai pada situasi kondisi lingkungan yang memberikan dampak terhadap pengguna atau lingkungan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Berbicara tentang keamanan tentunya bukan hal yang baru dibicarakan bahkan diseluruh dunia faktor keamanan sangatlah penting baik keamanan pada warganya maupun pada warga asing yang berkunjung dinegara tersebut. Fenomena seperti perampokan, tindakan seksual dan yang lainnya merupakan hal yang tidak diinginkan oleh setiap orang sebab akibat dari perbuatan tidak terpuji tersebut bisa membuat setiap orang memiliki trauma dan bisa menghilangkan rasa kepercayaan diri terhadap korban yang mengalaminya. Dengan pokok permasalahan ini dalam skup kecil pada lingkungan kompleks yang hanya didiami oleh beberapa kepala rumah tangga kurang lebih ±80 kepala rumah tangga yang dikepalai oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) dengan luas wilayah sekitar ±2, ½ hektar terletak di Desa Suka Maju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli

Serdang. Komplek Ini sudah berdiri sejak 2010 dan banyak hal yang sudah dirasakan oleh warga suka dan duka selama ber domisili di komplek tersebut. Faktor keamanan menjadi salah satu permasalahan yang dirasakan oleh warga mulai dari hal kecil seperti sepatu sampai kendaraan roda empat alias mobil milik warga juga pernah hilang dan sampai sekarang ini ini belum diketahui.

Dari kejadian yang dikeluhkan oleh warga tersebut dan ditindak lanjuti oleh pengelola Komplek dalam hal ini yang bertindak adalah Ketua Rukun Tetangga (RT) menggagas untuk keamanan warganya untuk mengadakan tenaga keamanan agar hal serupa seperti yang sudah pernah dialami oleh warga tersebut tidak terulang kembali atau setidaknya dapat meminimalisir kejahatan di lingkungannya. Dengan alasan keamanan maka dibutuhkan struktur organisasi dan penentuan tugas serta tanggungjawab para pihak agar kegiatan pengadaan dan pelaksanaan tugas para penjaga malam nantinya dapat benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik dan warga melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam surat kesepakatan.

Pada sebuah terbitan jurnal yang dipublikasikan dengan judul Identifikasi Pengaruh Sistem Keamanan Lingkungan Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian Di Kota Surakarta Dengan Metode Sistem Informasi Geografis memiliki korelasi positif dalam meminimalisir terjadinya kejahatan lingkungannya, meskipun tidak besar tapi cukup memberikan pengaruh (7). Tugas dan tanggungjawab seorang petugas keamanan atau nama kerennya adalah (SATPAM) yang ditulis oleh ikhwanudin terbi di Jurnal Security dengan mengangkat thema "Profesionalisme Satpam di Masa Pandemi COVID-19" Profesionalisme dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh para satpam khususnya dan para pengelola atau manajemen satpam dengan membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) yang nantinya dilaksanakan oleh petugas keamanan (2).

Dari uraian karya yang sudah dipublikasikan dapat diambil satu simpulan dimana sebuah organisasi yang mengelola sumber daya keamanan harus memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) yang nantinya akan dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak pengelola atau manajemen organisasi, baik lingkungan, instansi pemerintah maupun perusahaan yang memiliki layanan keamanan bagi wilayahnya.

Metode

Dalam menghasilkan sebuah standar operasional prosedur yang sesuai dengan kriteria pimpinan warga dan mendapat persetujuan dari pada warganya maka dengan ini kami bersama tim penyusunan standar operasional prosedur pekerjaan seorang penjaga keamanan atau nama bekennya SATPAM maka dengan ini kami mendampingi dan memberi penjelasan tentang ruang lingkup tugas dan tanggungjawab oleh petugas keamanan dan juga hak dan kewajiban dari warga yang menerima layanan keamanan tersebut. Adapun tata cara dalam menyusun standar operasional prosedur bagi petugas keamanan ini adalah dengan mengumpulkan beberapa perwakilan dari warga, juga kepala Lingkungan dalam hal ini yang bertindak adalah kepala RT yang mengelola kegiatan petugas keamanan tersebut, yang akan dituangkan dalam sebuah kesepakatan antara pengelola (RT), petugas keamanan dan juga perwakilan warga yang akan ditandatangani secara bersama-sama sebagai rujukan apabila terjadi sesuatu hal yang salah satu dari para pihak tidak menjalankannya. Sebagai ketua RT memberikan pelayanan kepada warganya dengan menyediakan petugas keamanan agar warga merasa aman.

Pelayanan Publik (*Public service*) adalah pelayanan yang ditunjukkan kepada publik terhadap kebutuhan yang bersifat umum dari masyarakat (8). Sebagai pimpinan warga ketua RT tidak serta merta dalam mengambil keputusan namun melibatkan beberapa pihak

diantaranya adalah tim kegiatan penyusunan Standar Operasional Prosedur. Pengertian prosedur mengandung arti sebagai tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan masalah (1). Untuk jalannya kegiatan pengelolaan petugas keamanan maka penyusunan standar operasional dapat memberikan kemudahan bagi pengelola dan mengurangi tingkat kekwatiran warga atas kualitas dari penjaga keamanan dengan adanya susunan standar operasional prosedur yang sudah disepakati bersama.

Para pemberi layanan dalam menerapkan SOP pada pelayanannya, dapat melakukan pelayanan secara prima dengan menyelesaikannya tepat pada waktunya serta adanya kejelasan dalam pelayanan, sehingga dapat dilakukan pelayanan secara prima dengan menyelesaikan tepat waktu serta ada kejelasannya dalam pelayanannya (4). Selain penerapan SOP maka petugas keamanan juga harus memerlukan pendidikan dan pelatihan satpam agar dapat bertanggungjawab terhadap tugas dan kewajibannya dan dapat bertindak lebih efektif dalam kewenangannya sebagai pengamanan fisik yang sifatnya terbatas dan nonjustice di perusahaan (3). Menurut "Perkapolri No 24 Tahun 2007, BAB III, Pasal 6, Ayat 1" Pengamanan Fisik adalah segala usaha dan kegiatan untuk mencegah atau mengatasi timbulnya ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan suatu instansi / proyek / badan usaha secara fisik melalui kegiatan pengaturan, penjagaan dan perondaan serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi / proyek / badan usaha yang bersangkutan. Objek yang diamankan pada saat pengamanan fisik, adalah:

1. Asset : Benda bergerak – benda tidak bergerak, gedung, harta benda.
2. Personel : Klien, Atasan, manajemen, Nasabah, Konsumen, Supplier, Pengunjung, Tamu dan Rekan.
3. Informasi : Keberadaan staff, proses produksi, kekuatan pengamanan, data-data perusahaan (5).

Adapun capaian hasil yang didapatkan dalam kegiatan penyusunan standar operasional prosedur ini adalah petugas keamanan dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masyarakat memiliki kewajiban iuran bulanan serta mendapatkan keamanan lingkungan sehingga mebgurangi kekwatiran akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan selama bertempat tinggal di lingkungan RT VI dengan adanya petugas kemanan.

Hasil dan Pembahasan

Berbagai tahapan yang dilakukan sebelum merampungkan sebuah SOP (Standar Operasional Prosedur) dibagi dalam 3 bagian yaitu:

1. Tahapan Persiapan

Adapun tahapan penyusunan SOP dilakukan dengan syarat yaitu: Pertama, mengacu pada peraturan perundang-undangan. Kedua, ditulis dengan jelas. Ketiga, memperhatikan SOP lainnya. Keempat, dapat dipertanggungjawabkan (6). Pada tahap ini diawali survei lokasi lalu berkunjung dengan Ketua RT VI sebagai subjek lokasi pengabdian dengan mengumpulkan atau mendeskripsikan fenomena-fenomena masalah seputar keamanan lingkungan, bentuk kejadian apa saja dan aksi yang dilakukan seperti apa serta pada hari-hari apa kejadian itu. Memantau kondisi lingkungan apakah sistem keluar masuk menggunakan satu pintu atau masih banyak celah-celah yang bisa menjadi akses terjadinya kesempatan bagi para pelaku kejahatan. Mendata jumlah warga yang disesuskan dengan jumlah petugas keamanan. Perlu di amati lingkungan sekitar apakah dibutuhkan media digital untuk merekam sejumlah kejadian yang akan terjadi seperti CCTV, serta keadaan ekonomi warga untuk menentukan besaran iuran setiap bulannya.



Kata sambutan dari Dekan Fakultas Hukum ibu Elyani, SH,M Hum pada acara pembukaan pendampingan penyusunan SOP petugas keamanan dilingkungan RT VI Rorinata Suka Maju. Pada kata sambutannya mengharapkan kepada pengurus RT agar selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan.

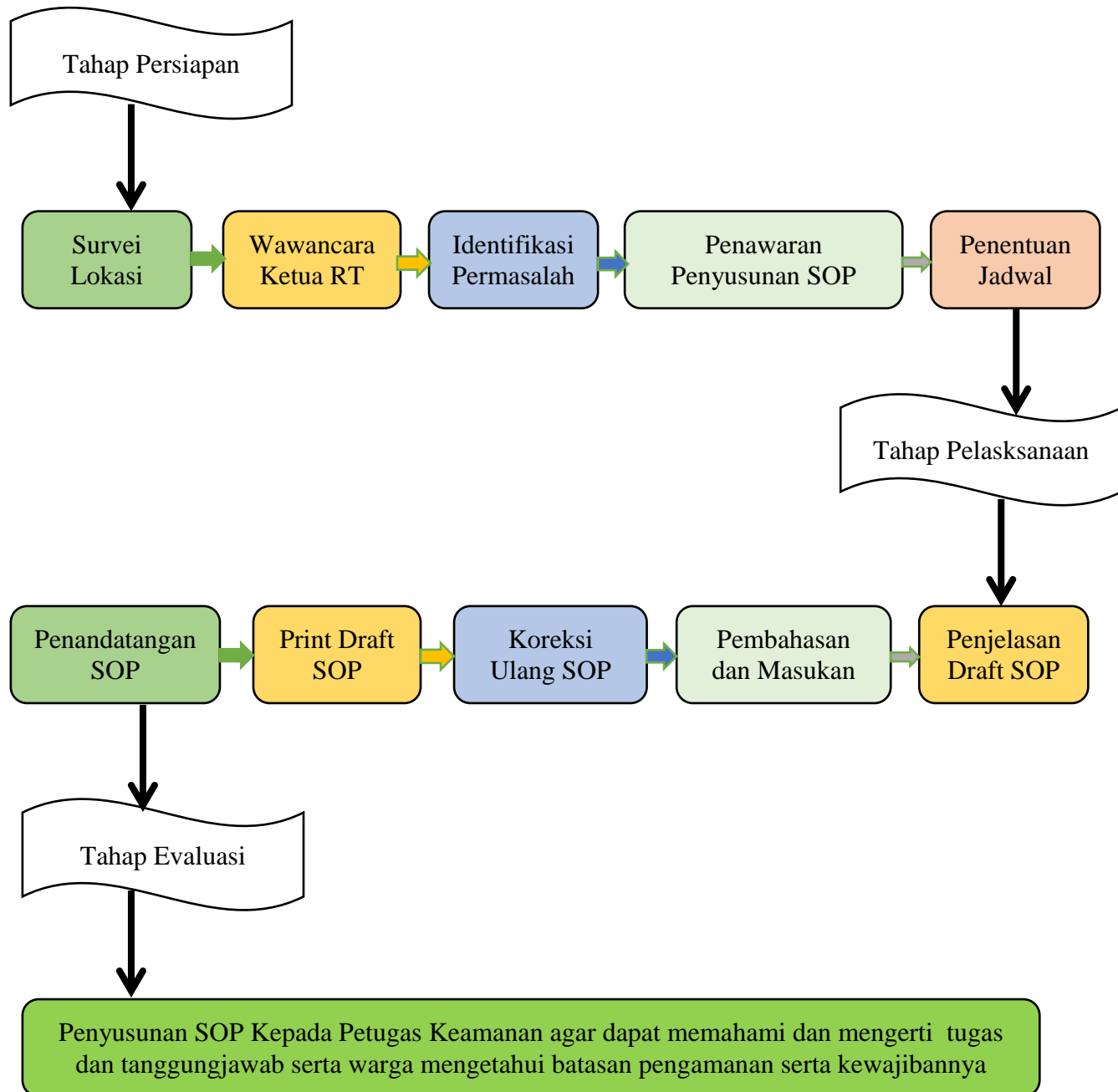
2. Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penjaga Keamanan dalam rangka mengsinergikan kebutuhan warga dengan tugas dan tanggungjawab penjaga keamanan. Kegiatan ini diikuti oleh tujuh orang dosen Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien, tiga orang mahasiswa dan dihadiri perwakilan warga terdiri dari pengurus RT empat orang dan warga empat orang. Dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan ini di lakukan di Kediaman RT VI pada tanggal 1 April 2022. Media yang digunakan dalam kegiatan diantaranya adalah, labtop dan *invocus*, papan tulis dan ATK lainnya.

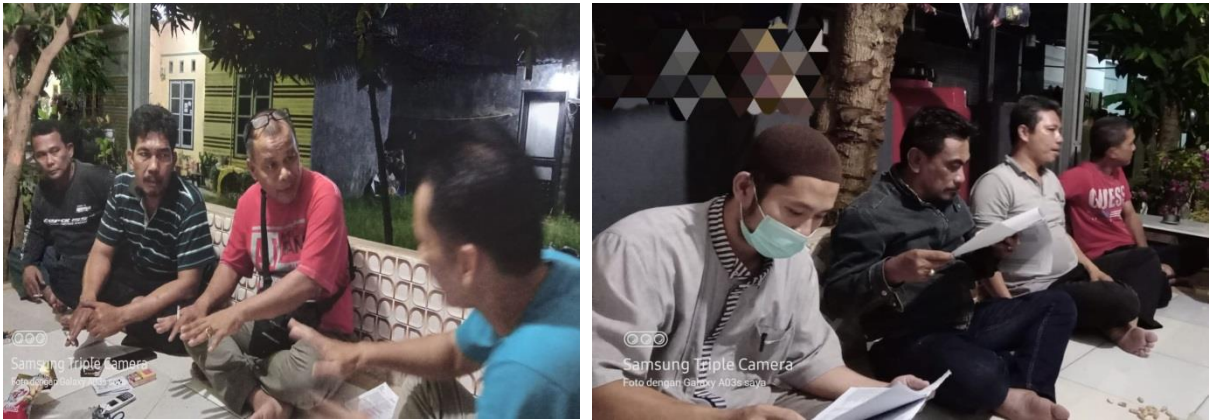
3. Tahap evaluasi

Setelah penyusunan SOP yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan warga serta tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak maka dilakukan evaluasi. Masyarakat mengetahui dan memahami batas-batas tugas dan tanggungjawab petugas keamanan, serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga agar pelaksanaan tugas keamanan dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman setelah dibagikan dan disusun SOP tersebut. Kejadian yang selama ini terjadi diakibatkan karena belum diaktifkan petugas keamanan hanya partisipasi warga saja melakukan Ronda itupun tidak rutin alias tidak terjadwal selain itu, beberapa lorong batas komplek belum ditembok sehingga akses keluar masuk orang lain selain warga komplek sangat berpeluang besar terjadinya hal yang merugikan warga seperti mengambil spion mobil, sepeda motor, pembobolan rumah kosong, ditambah lagi petugas pengumpul barang bekas alias bootut yang pernah dipergoki sepatusepeda/becak anak-anak komplek yang terparkir di halaman atau di jalan komplek. Maka dengan kejadian tersebut pihak pengelola RT VI akan melakukan pembenahan terkait peluang terjadinya hal yang merugikan warganya.

Adapun tahapan – tahapan yang dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:

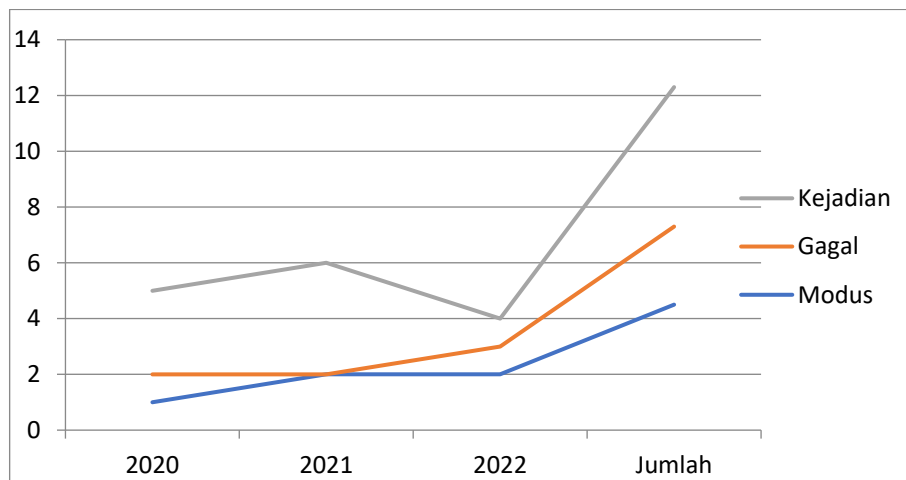


Gambar 1. Tim Pendamping Penyusunan SOP



Dialog antara petugas keamanan dengan pengurus RT VI mengenai teknis pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sesuai SOP yang sudah disepakati. Pembacaan draf SOP yang sudah disusun oleh tim pendampingan penyusunan SOP kepada pengurus RT dan perwakilan dari petugas keamanan.

Berikut ini menunjukkan grafik kejadian kejahatan modus dan percobaan serta pencurian dalam kurun waktu tiga tahun terlihat meningkat dari modus sampai kejadian tindakan pencurian yang hal ini dapat memberikan dampak kepada warga tidak aman, khawatir apabila meninggalkan kediamannya untuk beraktivitas. Tindakan kejadian kejahatan pencurian dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 1. Tindak Kejahatan

Simpulan Dan Saran

Dari uraian latar belakang kemudian persiapan, pelaksanaan serta evaluasi mendapatkan hasil kesimpulan:

1. Sudah terlaksana pendampingan dimana petugas keamanan paham batasan-batasan tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas dengan berpedoman pada SOP yang sudah

- dibuat dan disepakati para pihak.
2. Memberikan pengetahuan kepada pengurus RT dalam mengelola keamanan lingkungan dalam hal kewajiban dan lingkup tanggungjawab seoprang petugas kemanan di komplek.
 3. Dengan kegiatan dapat mengurangi rasa kekwatiran warga akan ancaman yang dilakukan oleh tindak kejahatan.
 4. Diharapkan kepada petugas keamanan agar menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan agar terhindar dari tuntutan warga jika terjadi hal yang diluar tugas dan tanggungjawabnya.
 5. Pengelola RT diharapkan agar menghimbau selalu waspada kepada warga, menyimpan barang-barang berharga pada tempat yang tidak mengundang perhatian pelaku tindak kejahatan.

Daftar Rujukan

1. Fatimah, Nur, endah. (2015). Strategi Pintar Menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur). Yogyakarta. Pustaka Baru Press.
2. Ikhwanudin, Hudha. (2020). Profesionalisme Satpam di Masa Pandemi COVID-19. <https://jurnalsecurity.com/profesionalisme-satpam/>. April 2022.
3. Sudahnan. (2011). Kewenangan Satpam Sebagai Tenaga Keamanan di Perusahaan. <https://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201207081310382587/11.pdf>. 16(3). 140-148. April 2022.
4. Sulam, At.all. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Operasional Prosedur terhadap Efektifitas Pelayanan Keuangan di IAIN Sultan Amai Gorontalo. E-Jurnal AI-Buhuts. 15(2). 01-20. April 2022.
5. Perkapolri No 24 Tahun 2007, BAB III, Pasal 6, Ayat 1. Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Seorang Satpam. <https://ppbm.co.id/tanggung-jawab-satpam/>. PPBM Corporate Solution. April 2022.
6. Tambunan, Sony, Toman. (2019). SOP Standar Operasional Prosedur Instansi Pemerintah. Bandung. YRAMA WIDYA.
7. Virgatama, Raihan, dkk. (2019). Identifikasi Pengaruh Sistem Keamanan Lingkungan Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian Di Kota Surakarta Dengan Metode Sistem Informasi Geografis. Jurnal Geodesi UNDIP. 8(1). 398-407.
8. Yusriadi. (2018). Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik (Bureaucratic Reform In Public Serivice). Yogyakarta. DEEPUBLISH.